



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
AROSUKA

**RENJA PERUBAHAN
INSTANSI PEMERINTAH**



TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah bersifat prediktif dan memuat hal-hal yang fundamental dan krusial yang terdiri dari Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 maka Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun.

RPJP Daerah Tahun 2006–2025 Kabupaten Solok ini merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Operasional RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, didalamnya memuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Renja merupakan pedoman perencanaan perangkat daerah untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan perangkat daerah secara rinci. Renja mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah yang merupakan breakdown dari Renstra perangkat daerah selama lima tahun. Keterkaitan kedua dokumen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penterjemahan dari tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan untuk menyusun program dan kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Perubahan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2019 mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Solok Tahun 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2019. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKPN) dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah. Perubahan RKPD terjadi karena sejalan dengan pelaksanaan APBD Tahun 2019 ditemui beberapa hal yang sudah tidak sejalan lagi dengan asumsi-asumsi yang melatar belakangi penyusunan RKPD awal. Hal ini apabila tetap dilanjutkan, dapat menimbulkan ketidaksinkronan program dan kegiatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKperangkat daerah berkenaan; dan/atau;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2019 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Satpol PP dan Damkar Tahun 2019. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2019, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi, keluran dan hasil kegiatan.

Perubahan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2019 disusun berdasarkan pada Perubahan Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan hasil pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun 2019, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian tujuan dan

sasaran strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok seperti yang tertera dalam Tabel 4.1 Perubahan Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan dokumen Renja Satpol PP dan Damkar Tahun 2019 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum Perubahan

Perubahan Renja Bar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2019 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 71);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 Nomor).

1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan

1.3.1 Maksud

Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Solok.

Penyusunan Perubahan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah bagi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok dalam melaksanakan perubahan terhadap capaian program dan hasil kegiatan serta pagu anggaran dalam tahapan perubahan di tahun 2019 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2019.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2019 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan Satpol PP dan Damkar sampai dengan triwulan dua tahun 2019.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta
5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Solok Tahun 2019 dengan dokumen Perubahan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2019.

1.4. Sistematika Perubahan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang Perubahan RKPD
- 1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan
- 1.3 Dasar Hukum Perubahan RKPD
- 1.4 Sistematika Perubahan RKPD

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II

Bab III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Satpol PP dan Damkar Tahun 2019

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP DAN DAMKAR TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yaitu Pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. Urusan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sampai saat ini belum mencapai hasil yang optimal, kegiatan penertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran berada pada empat bidang yaitu Bidang Ketertiban umum, ketentraman, Bidang Penegakan Peraturan daerah, Bidang Perlindungan masyarakat dan bidang Pemadam kebakaran.

Dalam pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok melaksanakan 8 program dengan 24 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.6.197.351.569,- dengan realisasi anggaran sampai keadaan pada triwulan II sebesar Rp. 2.371.690.736,- ,atau 38,27%, masih rendahnya realisasi anggaran sampai triwulan II disebabkan karena terdapat kegiatan yang tidak bisa terealisasi seperti belanja pakaian kerja lapangan pada kegiatan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan karena terjadi gagal tender yang disebabkan keterbatasan waktu dll, tetapi secara fisik kegiatan telah terlaksana sesuai ketentuan. Selain itu, ada beberapa belanja yang perlu penambahan dan pengurangan sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada.

Pada anggaran kasnya triwulan III. Kegiatan yang telah terealisasi tetapi masih rendah antara lain : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan (16,47%) dan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (24,32%).-

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan pada triwulan II tergolong baik, namun terdapat kekurangan beberapa belanja serta kelebihan pagu anggaran pada belanja lainnya, sehingga perlu dilakukan penambahan dan pergeseran anggaran untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satpol PP dan Damkar Tahun 2019. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok sampai triwulan II Tahun 2019 dan tingkat capaian Renstra, dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada tahun 2016-2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan RKPd tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten / Kota tahun Berjalan yang di Evaluasi tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD s/d Tahun 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	00	01			Program administrasi perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	600 %	3.486.960.904	86,70%	1.530.786.704	100%	368.902.569	25%	101.466.963	25%	164.102.980					50%	265.569.943	137%	1.796.356.647	23%	0,52	Satpol PP dan Damkar	
				02	01	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	Jumlah Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	100 %	7.000.000																				
				01	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat peramngko,mater ai dan benda pos	600 %	18.300.000	99%	40.980.000	100%	2.000.000	7'8%	150.000	35,25%	705.000					42,7 5%	855.000	142%	41.835.000	24%	2,29		
					02	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	600 %	237.420.000	90%	85.057.539	100%	29.500.000	39,40%	11.339.186	5,15%	1.520.130					43,5 9%	12.859.316	134%	97.916.855	22%	0,41	
					06	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan dinas operasional	Jumlah pembayaran pajak / balik nama/ kir kendaraan bermotor	600 %	115.445.900	95%	22.122.400	100%	23.222.950	3'83%	889.050	12,64%	2.935.900					16,4 7%	3.824.950	111%	25.947.350	19%	0,22	
					08	4	penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran retribusi sampah	600 %	9.000.000	100%	3.600.000	100%	1.800.000										100%	3.600.000	17%	0,40		
					10	5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	600 %	132.026.504	99%	62.427.037	100%	18.000.000	59'15%	10.648.600	13,74%	2.474.400					72,9 1%	13.123.000	172%	75.550.037	29%	0,57	
					11	6	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah belanja cetak dan penggandaan	600 %	84.500.000	99%	25.277.150	100%	12.000.000	23'25%	2.790.000	35,91%	4.309.250					59,1 %	7.099.250	158%	32.376.400	26%	0,38	
					12	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	600 %	45.500.000	100%	9.490.000	100%	4.000.000										100%	9.490.000	17%	0,21		
					13	8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	600 %	356.000.000	100%	53.725.000	100%	62.608.619			95,97%	60.088.000					95,9 7%	60.088.000	196%	113.813.000	33%	0,32	

7	Meningkatnya penegakan peraturan daerah	05	17			Program pengawasan wawasan kebangsaan	Jumlah wawasan dan rasa kebangsaan	200 %	101.150.000	100%	97.175.850	100%	2.000.000									100%	97175850	50%	0,96		
				17	06	Peningkatan rasa solidaritas dan kerja bakti serta persiapan upacara bulanan di Kab.Solok	Jumlah upacara bulanan	600 %	52.600.000	99%	49.962.250											99%	49962250	17%	0,95		
				07	23	Peringatan hari jadi HUT RI	Jumlah peringatan hari jadi Satpol PP dan Damkar, linmas dan HUT RI	200 %	48.550.000	100%	47.213.600	100%	2.000.000									100%	47213600	50%	0,97		
8	Meningkatnya perlindungan masyarakat	5	19			Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kab.Solok	600 %	496.707.000	1	240.924.000		70.730.000	23,29%	16.475.100	44,13%	31.214.204					67%	47.689.304	165%	288613304	28%	0,58
				01	22	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Jumlah sistim keamanan di masyarakat	600 %	496.707.000	98%	240.924.000	100%	70.730.000	23,29%	16.475.100	44,13%	31.214.204					67%	47.689.304	165%	288613304	28%	0,58
9	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat kab.Solok	05	01			Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)	Jumlah kewanman di lingkungan masyarakat	500 %	478.500.000																		
				20	09	Penyuluhan praktek perjudian dan penggunaan minuman keras	Jumlah penyuluh pada masyarakat dan pelajar	500 %	478.500.000	100%	52.899.000												100%	52899000	20%	0,11	
10	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pencegahan bahaya kebakaran	05	23			Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah bahaya kebakaran	500 %	9.611.553.400	99,08%	2.972.088.536	100%	2.116.953.000	26%	331.685.843	25,88%	499.780.795					51%	831.466.638	151%	3803555174	30%	0,40
				03	24	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebaya kebakaran	Jumlah pencegahan dini dan terkendalinya bahaya kebakaran dan berkurangnya kerugian yang ditimbulkan akibat bahaya kebakaran	500 %	8.202.971.000	98%	2.972.088.536	100%	1.801.960.000	18,00%	324.295.843	25,88%	466.306.795					44%	790.602.638	142%	3762691174	28%	0,46
				23	04	Peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang operasional lapangan bagi Satgas Damkar	Jumlah standar pelayanan pencegahan bahaya kebakaran	400 %	1.287.482.400			100%	299.993.000														
				01	23	Peningkatan pelayanan pengulangan bahaya kebakaran	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Damkar	400 %	106.100.000					6,97%	7.390.000	33,47%	33.474.000					40%	40.864.000	40%	40864000	10%	0,39
			19	01	18	Sosialisasi norma, standar, pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah sosialisasi pencegahan dini bahaya kebakaran	400 %	15.000.000			100%	15.000.000	51,83 %	7.775.000							51,83%	7.775.000	52%	7775000	13%	0,52

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SATPOL PP DAN DAMKAR TAHUN 2019

Urusan Penunjang Pemerintahan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2019 dengan jumlah anggaran Rp. 6.197.351.569,- dengan 8 program dan 24 kegiatan. Kemudian dalam usulan Perubahan Tahun Anggaran 2019 menjadi Rp. 4.997.351.569,- atau berkurang sebesar Rp.1.200.000.000,- dengan jumlah program dan kegiatan yang sama dengan rincian perubahan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat, bertambah sebesar Rp. 2.000.000,- karena penyesuaian belanja materai dengan kebutuhan Surat Pertanggung Jawaban Belanja Bendahara;
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, bertambah sebesar Rp. 5.000.000,- karena penyesuaian tarif telepon, air, dan listrik;
- 3) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 4) Penyediaan alat tulis kantor bertambah sebesar Rp.7.391.000,- karena menyesuaikan dengan kebutuhan kantor
- 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan bertambah Rp. 3.000.000,- untuk pengadaan plank nama dan merk ruangan yang sudah tidak relevan lagi;
- 6) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- 7) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor bertambah sebesar Rp.3.100.000,- karena sisa lebih pengadaan infocus dan sound system;
- 8) Penyediaan makanan dan minuman bertambah Rp. 16.000.000,- karena intensitas rapat yang rutin setiap bulannya;
- 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah bertambah sebesar Rp.20.000.000,- dikarenakan perkiraan frekuensi pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang meningkat;
- 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah bertambah sebesar Rp.10.724.000,- dikarenakan perkiraan frekuensi pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah yang meningkat.

2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
- 2) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional bertambah sebesar Rp. 62.000.000,-, karena tingginya intensitas ke lapangan;

- 3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor bertambah Rp. 8.000.000,-, karena tidak banyak peralatan dan perlengkapan kantor yang memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi.
3. Program peningkatan disiplin aparatur
 - 1) Pengadaan pakaian kerja lapangan sebesar Rp. 9.980.000,-
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - 1) Peningkatan sumber daya aparatur berkurang sebesar Rp. 8.515.000,-
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - 1) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan bertambah sebesar Rp. 7.900.000,-, untuk perjalanan dinas dalam daerah evaluasi kegiatan Trantib dan Damkar di kecamatan dan evaluasi laporan keuangan dan kinerja akhir tahun.
6. Program kesiagaan dan pencegahan bahaya pembakaran
 - 1) Sosialisasi norma, standar, pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran bertambah sebesar Rp. 10.000.000,-
7. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - 1) Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan berkurang Rp. 1.242.325.000,-
 - 2) Pengendalian keamanan lingkungan berkurang sebesar Rp. 68.157.000,-
 - 3) Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban serta aturan-aturan teknis dan pelaksanaannya berkurang sebesar Rp. 41.763.000,-
8. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 - 1) Pembentukan satuan keamanan lingkungan di Masyarakat berkurang sebesar Rp. 5.665.000,-
9. Program kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
 - 1) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran bertambah sebesar Rp. 6.164.000,-
 - 2) Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran bertambah sebesar Rp. 13.846.000,-

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RENJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2019**

No	Urusan Pemerintah Daerah/	Prioritas	Capaian Program (Indikator Sasaran)		Indikator Program (Outcome) / Indikator Kegiatan (Output)		Pagu Indikator Tahun		
	Program /Kegiatan		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Setelah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (9-8)
1.01.05	Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat						6.197.351.569	4.997.351.569	- 1.200.000.000
1.01.1.01.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Kategori Nilai AKIP	BB	Jumlah Materai dan paket yang tersedia	80,00	368.902.569	437.393.569	68.491.000
1.01.1.01.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1			Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	Materai 350 lembar, 4 buku cek	2.000.000	4.000.000	2.000.000
1.01.1.01.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2			Jumlah rekening air, listrik, telpon yang dibayarkan	3 rekening, 5 token, 12 bulan	29.500.000	34.500.000	5.000.000
1.01.1.01.05.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3			Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	15 unit	23.222.950	23.222.950	-
1.01.1.01.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4			Jumlah jasa kebersihan kantor	1 unit	1.800.000	1.800.000	-
1.01.1.01.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	5			Jumlah jenis yang diadakan	56 jenis	18.000.000	25.391.000	7.391.000
1.01.1.01.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6			Jumlah barang dicetak dan digandakan dan jilid	50 jenis	12.000.000	15.000.000	3.000.000
1.01.1.01.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	7			Jumlah alat listrik	5 jenis	4.000.000	4.000.000	-
1.01.1.01.05.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	8			Jumlah jenis peralatan kantor	7 jenis	62.608.619	65.708.619	3.100.000
1.01.1.01.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	9			Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	2 jenis	30.000.000	46.000.000	16.000.000
1.01.1.01.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10			Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	6 kali	80.000.000	100.000.000	20.000.000
1.01.1.01.05.01.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	11			Jumlahn rapat koordinasi	50 kali	105.771.000	117.771.000	12.000.000

1.01.1.01.05.01.02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Kategori Nilai AKIP	BB	Jumlah Peralatan Perkantoran		192.650.000	262.650.000	70.000.000
1.01.1.01.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1			Jumlah jenis pemeliharaan yang Dilaksanakan	1 kali (pengecatan kantor, pengecatan kantor, rehab wc) dan peralatan kebersihan kantor	27.650.000	27.650.000	-
1.01.1.01.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2			Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	6 kendaraan roda dua, 8 unit kendaraan	160.000.000	222.000.000	62.000.000
1.01.1.01.05.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	3			Jumlah computer dan laptop yang diservis	3 unit komputer, 6 unit laptop	5.000.000	13.000.000	8.000.000
1.01.1.01.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Kategori Nilai AKIP	BB	Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap	100%		9.980.000	9.980.000
1.01.1.01.05.01.03.07	Pengadaan pakaian kerja lapangan	1			Jumlah pakaian kerja lapangan dan kelengkapannya	7 stel	-	9.980.000	9.980.000
1.01.1.01.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Kategori Nilai AKIP	BB	Persentase ASN yang Mengikuti Latihan	100%	109.964.000	71.449.000	-38.515.000
1.01.1.01.05.01.05.06	Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	1			Jumlah aparatur yang dikirim untuk mengikuti bimbingan Teknis	3 orang	30.000.000	-	-30.000.000
1.01.1.01.05.01.05.07	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	2			Jumlah Aparatur yang Mengikuti pelatihan	50 orang	79.964.000	71.449.000	-8.515.000
1.01.1.01.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Kategori Nilai AKIP	BB	Persentase Laporan yang dihasilkan	100%	37.939.400	42.839.400	4.900.000
1.01.1.01.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 dokumen	37.939.400	42.839.400	4.900.000
1.01.1.01.05.01.19	Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Pembakaran	1	Kategori Nilai AKIP	BB	Persentase penurunan kebakaran	100%	15.000.000	25.000.000	10.000.000

PENUTUP

Perubahan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2019 merupakan tindak lanjut dari penyusunan Perubahan RKperangkat daerah Tahun 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Solok No. Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor Tahun 2019.

Perubahan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2019 disusun berdasarkan pada Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan hasil pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Tahun 2019, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Barenlitbang Kabupaten Solok yaitu *"Terwujudnya masyarakat Kabupaten Solok yang tertib, aman dalam suasana yang kondusif "* dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Solok dengan lebih efektif dan efisien.

Perubahan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan program dan kegiatan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok tahun 2019.

Arosuka, Agustus 2019

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SOLOK**



Drs. EFR/ADI.MM
NIP. 19680216 199009 1 002

RENCANA KINERJA TAHUNAN
Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok
TAHUN 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah	Penurunan pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindaklanjuti	150
2	Meningkatkan perlindungan masyarakat	Rasio satlinmas per Nagari	1;8
3	Meningkatnya kualitas penanganan bahaya kebakaran	Response Time Rate (Tingkat waktu tanggap) terhadap wilayah Manajemen Kebakaranb	100%

Arosuka, Agustus 2019

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SOLOK**



Drs. EFR/ADI.MM
NIP. 19680216 199009 1 002